Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor

: 03 /0.21/0PM-PTSP /5/2019

Tanggal

: 03 JANUARI 2019

Tentang: STATDAR PELAYANAN PADA DINAS PENAMANAN MODAL DAN

PELAYAN AN TERPADU FATU PINTU

STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar HukuM	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
		5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan
		Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
		8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
		9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
		10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;
		11. Peraturan Walikota Manado Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Tipe A;
		12. Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas

-		
		Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
		13. Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
2.	Persyaratan	a. Surat permohonan
	Pelayanan	 b. Profil Lembaga c. Melampirkan foto copy akta notaris bagi yang berbentuk yayasan d. Melampirkan foto copy identitas/KTP yang masih berlaku baik pemilik penyelenggara maupun penangggung jawab
		teknis edukatif
		e. Melampirkan foto copy ijazah formal/nonformal bagi pemilik/penyelenggara, penanggung jawab teknis edukatif maupun tenaga pendidik
		f. Melampirkan kurikulum jenis kursus yang bersangkutan
		g. Melampirkan tata tertib kursus
		h. Melampirkan denah/peta lokasi kursus i. Melampirkan pas foto pemilik/penyelenggara dan
		i. Melampirkan pas foto pemilik/penyelenggara dan penanggung jawab teknis edukatif ukuran 4 x 6 masing-
		masing sebanyak 2 (dua) lembar
		j. Melampirkan Surat rekomendasi dari DPC mitra HIPKI dsn
		forumPKBM
		k. Melampirkan surat keterangan domisili usaha dari
		kelurahan
		1. Foto copy Izin Lembaga Kursus dan Pendidikan sebelumnya
3.	Ciatana	(untuk perpanjangan izin)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PROSEDUR PELAYANAN IZIN
		MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN
		PEMOHON Lokel Pelnyanan
		Penyerahan/Pengambilan tzin Pemeriksaan Berkas
		Penesitian Lapangas Rekomendasi Tim Teknis
		Alar Preses: Pernbaugur an Retribusi Berhan ditaluk/ ditangguhkian Nendanyaran Retribusi Pernbaugur an Retribusi Pernbaugur an Retribusi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja

5.	Biaya/tarif	
6.	Produk	SK Kepala DPMPTSP Kota Manado tentang Izin Penyelenggaraan
	pelayanan	Lembaga Kursus dan Pelatihan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Tunggu, Toilet, Almari Dokumen, Rak Arsip, Meja kerja, Kursi kerja, AC, Komputer, Laptop, Printer, Telepon, Internet, ATK, Cetakan
8.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Teknis Izin
		- Mampu mengoperasikan Komputer
		- Mampu bekerja dalam Tim
		- Telah mengikuti Training Service Excellent
9.	Pengawasan	a. Pengawasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
	internal	Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
		b. Pengawasan langsung oleh Kepala Bidang
		c. Apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan teguran
		dan sanksi secara kontinyu dan konsisten
10.	Penanganan	Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:
10.	pengaduan,	- Pengaduan langsung
	saran, dan	- Melalui Kotak Saran
	masukan	- Melalui Website, Email dan Facebook PTSP
11.	Jumlah	- Verifikator Persyaratan Berkas 1 orang
	pelaksana	- Verifikator Dokumen Izin 1 Orang
		- Registrasi 2 orang
		- Back office 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	- Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Izin.
13.	Jaminan keamanan produk	Surat Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Sah dan Asli serta memakai kode khusus.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik dimasa mendatang.
15.	Masa Berlaku Izin	3 tahun
16	Jam	• Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
	Pelayanan	• Jumat : 08.00 – 13.30 WIB

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal:

2019

DINAS PENANAMAN NI OL OMN PELAYANAN TERPADU ATU MATU DINAS PENANAMAN TERPADU ATU MATU

KEPALA DINAS,

JIMMY C. E. ROTUNSULU, SE.M.Si PEMBINA NIP: 19731218 200012 1 001